



**RENCANA KERJA TAHUN
2019
(RENJA)**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD adalah dokumen OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses Penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan

dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti, RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Kepala SKPD menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan bpedoman kepada Rencana Strategis SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomir 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Uridang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2019 merupakan dokumen Perencanaan dalam jangka 1

(satu) tahun yang dijadikan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019.

Tujuan :

Tujuan dari penyusunan Renja ini antara lain adalah sebagai salah satu panduan dalam perumusan kebijakan umum, program dan kegiatan pada bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAE I Pendahuluan

Dalam Bab ini dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

BAB II Evaluasi Pencapaian Renja Tahun 2017

Dalam Bab ini dipaparkan hasil evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2017 , Analisis Kinerja Pelayan SKPD, Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Pogram dan Kegiatan

Dalam Bab ini dipaparkan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program Kegiatan.

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PENCAPAIAN RENJA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dan Capaian Renstra

Urusan OTODA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 terdiri dari 19 (sembilan belas) program dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5). Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 6). Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 7). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 8). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
- 9). Program Kerja sama informasi dengan Media Massa
- 10). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro, Kecil dan Menengah
- 11). Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 12). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 13). Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 14). Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- 15). Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan
- 16). Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 17). Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 18). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Daerah
- 19). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk lebih jelasnya capaian Renja dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKUAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
PENCAPAIAN RENSTRA S/D 2016

Tabel 2.1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dari Kegiatan tahun lalu (2017)			Target dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan (2018)				
			Target Capaian Kinerja Renstra tahun 2016	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target Renja tahun 2017	Realisasi Renja tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Capaian Kegiatan tahun berjalan	Program dan Kegiatan tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
20_03	Urusan Wajib									
20_03	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawainan dan									
	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG									
20_03_01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya tagihan telefon, fax, air dan listrik kantor	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzininan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya administrasi keuangan	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kantor yang bersih	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja gedung kantor	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
11	Penyediaan Barang Cetak dan	Tersedianya barang cetakan dan	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
17	Penyediaan Makanan dan Minuman kebutuhan tamu pemko	Terseedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu pemko	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%

18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas raker dan rakon	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%
19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya pembayaran honor pegawai harian	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%
20	03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 unit PC	2 Unit PC, 1 Paket Alat Studio,	2 Unit PC, 1 Paket Alat Studio,	100% 2 Unit PC, 1 Paket Alat Studio,		
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah	Terpeliharanya rumah jabatan	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Sahui	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Sahui	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil/Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%
83	Pensertifikatan/Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah	Tersertifikasinya Tanah Milik Pemerintah 2 lokasi	2 lokasi	-	-	-	1 tahun	100%
20	03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya disiplin aparatur dalam berpakaian waktu melaksanakan tugas	108 stel	18 stel	18 stel	100% 12 stel	12 stel	100%
20	03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
03	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur di lingkungan Seitdako	41 orang	41 orang	17 orang	100% 10 orang	10 orang	100%
20	03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah							
02	Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non Departemen/LN	Terlaksananya penerimaan kunjungan pejabat negara/LN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%
08	Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah	Tersedianya Pidato dan lancarnya kegiatan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100% 1 Tahun	1 Tahun	100%

10	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Terselenggaranya peringatan hari besar Nasional	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%
12	Peringatan HUT Kota Padang Panjang Ke 227	Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kota Padang panjang ke 227	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
13	Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokolan	Terselenggaranya kegiatan keprotokolan di Pemko Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	1 tahun	1 tahun	100%
15	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Padang Panjang	Terlaksananya koordinasi dengan unsur pimpinan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00	Pelatihan SDM dalam Bidang Protokoler dan MC	Terlaksananya Pelatihan Protokoler dan MC di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	40 org	40 org	40 org	100%	40 org	40 org	40 org	100%	100%
16	Pelaksanaan Kegiatan APEKSI Tahun 2018	Terikutiinya Munas APEKSI dan Muskod APEKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	03 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penyelesaian; Masalah Hukum Pemda	Terselenggaranya permasalahan hukum Pemerintahan Daerah	3 kasus	4 kasus	4 kasus	150%	6 kasus	4 kasus	4 kasus	100%	100%
16	Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemanjatpan Konsep Produk Hukum Daerah	terlaksananya klinik hukum, pendampingan hukum, advokasi permasalahan hukum pernda	13 Perda, 26 Perwako	13 Perda, 26 Perwako	8,Perda, 15 Perwako	137,5%, 333%	8,Perda, 15 Perwako	8,Perda, 15 Perwako	8,Perda, 15 Perwako	100%	100%
18	Pembuatan Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pengelolaan Website JDIIH	Penyebarluasan peraturan Kota Padang Panjang melalui buku lembaran Daerah dan Web JDIIH	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%
22	Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat Hukum Masyarakat yang membutuhkan	Terfasilitasinya penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat yang membutuhkan	2 kasus	-	-	-	-	-	2 kasus	2 kasus	100%
20	03 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Penataan dan Penetapan Batas Antar Kelurahan Kota Padang Panjang	Terdapatnya batas wilayah yang jelas dan pasti untuk kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	100%	-	-	-	-	-
05	Fasilitasi pengalihan urusan Pemerintahan Konkuren	terlaksananya serah terima P3D	-	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-
06	Penegasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang	Terbentuknya Koordinat titik Batas antar Wilayah	-	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%
20	03 30	Program Pemberdayaan Pemerintahan Ke camatan dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Penilaian Kompetensi Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah	Terlaksananya penilaian terhadap Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah Bemrastasi	-	-	-	-	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100%

20	03	31	Program Fasilitasi Kesiembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan								
	04	Fasilitasi Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Terlaksananya Fasilitasi pencapaian SPM	1 laporan	15 buku	100%	6 bidang	6 bidang	100%		
	05	Bimtek Evaluasi Jabatan	Meningkatnya sistem manajemen Aparatur	60 orang	-	-	60 orang	60 orang	100%		
	06	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Jabatan	-	-	-	1200 Jabatan	1200 Jabatan	100%		
	07	Monitoring dan Evaluasi Perwako kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perwako Kadudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah	850 jabatan	-	-	24 OPD	24 OPD	100%		
	08	Revisi Perwako Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.	Terlaksananya Revisi Perwako Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.	-	-	22 buku	22 buku	100%	1 kali	1 kali	100%
20	03	48	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								
	01	Pembinaan SOP	Terlaksananya Pembinaan SOP yang telah disusun SKPD	-	-	5 SKPD	5 SKPD	100%	24 OPD	24 OPD	100%
	02	Pembinaan Pelayanan Publik	Terlaksananya Pembinaan Baku Mutu Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang	-	-	8 Laporan	8 Laporan	100%	24 OPD	24 OPD	100%
	03	Survey Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	6 SKPD	15 Buku	15 Buku	100%	24 OPD	24 OPD	100%	
20	03	39	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Daerah								
	01	Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Pengendalian Laju Inflasi di Kota Padang Panjang	8 kali	8 kali	1 tahun	1 tahun	100	1 dokumen	1 dokumen	100%
20	03		Program Fasilitasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								
	01	Koordinasi kerjasama daerah dalam pengembangan ekonomi daerah	terlaksananya rapat kerja sama dan koordinasi dalam pengembangan ekonomi daerah	8 kali	8 kali	-	-	-	-	-	
	02	Pembinaan dan Monitoring Perkembangan Usaha Bidang Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap Perkembangan Usaha Bidang SDA & LH	1 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	4 kali	4 kali	100%

20	03	33	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah					
	11	Pengkoordinasian dan Pengendalian Penyaluran RASKIN	Terlaksananya Penyaluran RASKIN di Kota Padang Panjang	16 Kelurahan	16 kelurahan	16 kelurahan	16 kelurahan	100%
	14	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang	Terlaksananya pembinaan, Monitoring dan evaluasi perkembangan KPRI	26 KPRI	26 KPRI	26 KPRI	26 KPRI	100%
	15	Fasilitasi dan Pembinaan BUMD	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaaan BUMD di Kota Padang Panjang	-	-	100%	100%	100%
	16	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pasar Pusat	Terlaksananya kajian penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pasar Pusat	-	-	-	-	100%
20	03	36	Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah					
	01	Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan	Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Padang Panjang	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	100%
	02	Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan pengadaan secara elektronik (SPSE dan aplikasi pendukungnya)	100%	100%	100%	100%	100%
	03	Operasional Maintenance LPSE	Terlaksananya proses registrasi,verifikasi,pelelangan/seleksi secara elektronik, Tersedianya peralatan/perangkat infrastruktur LPSE	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Pembinaan Jasa Konstruksi	Tersedianya laporan pelaksanaan Jasa Konstruksi di OPD Kota Padang Panjang	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi pokja ULP dan PPK	90 orang	90 orang	90 orang	100%	-
20	03	39	Program Peningkatan Akurabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
	01	Penyusunan LKjIP Kota Padang Panjang	Buku laporan kinerja pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017	27 SKPD	27 SKPD	45 buku	45 buku	100%
	02	Evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang	Terlaksananya evaluasi kinerja SKPD	27 SKPD, 12 kali rapat	45 buku, 12 kali rapat	100%	12 kali	100%

23	Mengikuti MTQ Tingkat Propinsi	Terlaksananya Kegiatan Mengikuti MTQ Tingkat Propinsi	1 keg	1 keg	-	-	-	-	1 keg	1 keg	100%
24	Persiapan Mengikuti MTQ Propinsi Sumatera Barat	tersedianya pelaksanaan persiapan mengikuti MTQ Propinsi Sumbar	1 keg	1 keg	-	-	-	-	1 keg	1 keg	100%
25	Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam	Terlaksananya peringatan Hari-nari Sesar Islam	8 HBI	8 HBI	8 HBI	100%	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	100%
	Bimbingan dan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Terlaksananya Pelatihan dan lomba penyelenggaraan jenazah	90 org	90 org	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga BP4	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga BP4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pembinaan Remaja Masjid Kota Padang Panjang	Terlaksananya Pembinaan Remaja Mesjid Kota Padang Panjang	-	-	6 kali	6 kali	100%	14 kali	14 kali	14 kali	100%
32	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Islamic Center	Kesepakitanan Pemda dengan Stakeholders tentang Islamic center dan Pembentukan kelembagaan Islamic center	-	-	-	-	-	-	1 keg	1 keg	100%
33	Monev Efektifitas Bantuan Hibah	Terlaksananya Money, verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah	-	-	-	-	-	-	11 bulan	11 bulan	100%
34	Fasilitasi Kegiatan Wird Pengajian Majlis Taklim Bulanan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Wird Pengajian Majlis Taklim Bulanan se kota Padang Panjang	36 Mesjid	36 Mesjid	-	-	-	-	12 kali	12 kali	100%
35	Penggiatan Mesjid Kota Padang Panjang	Terlaksananya Periliaian Jemaah tergiat masjid se kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	36 Mesjid	36 Mesjid	100%
20	03/18	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa									
	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya kegiatan pembangunan Kota Padang Panjang bagi masyarakat portal.2 staiun televisi	57 Media cetak,5 portal,2 staiun televisi	35 Media cetak,8 portal,3 staiun televisi	102.2	35 Media cetak,3 media elektronik	100%	35 Media cetak,3 media elektronik	35 Media cetak,3 media elektronik	100%
	03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Tersosialisasikannya Kegiatan dan Kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang di Tahun 2017 mempunyai 10 (sepuluh) sasaran yang merupakan sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Semua sasaran tersebut didukung dengan program/kegiatan pendukungnya yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017. Secara umum semua sasaran yang sudah ditargetkan tersebut telah berhasil diwujudkan.

Adapun persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran $\geq 100\%$ “**Memuaskan**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100% predikatnya “**Sangat Baik**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya “**Baik**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 55% sampai dengan dibawah 70% predikatnya “**Cukup**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 55% predikatnya “**Kurang**”

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran stratejik dapat didilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-5/08)			Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2016 (Tahun n-2)	Tahun 2017 (Tahun n1)	Tahun 2018 (Tahun n)	Tahun 2019 (Tahun n+1)	Tahun 2016 (Tahun n)	Tahun 2017 (Tahun n)	Tahun 2018 (Tahun n)	Tahun 2019 (Tahun n+1)			
1	pengadaan tanah untuk pembangunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Penyelesaian masalah tanah yang dilaksanakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Penataan Batas kelurahan di Kota Padang Panjang	8 Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Kelurahan	1 Dokumen	Catatan Analisis				
4	Jumlah sekolah sejati yang dibina	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1	Catatan Analisis
5	Jumlah peringatan hari-hari besar Islam	8 HBI											
6	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	5 kegiatan	5 kegiatan										
7	Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ	3 Miliar	3 Miliar										
8	Jumlah Perda yang ditetapkan	8 Perda											
9	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan	15Perwako											
10	Terdokumentasinya dan tersebarluasnya peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah	2 Dokumen	2 Dokumen										
11	Penyuluhkan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Laporan RANHAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Tersedianya dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja, LKPJ dan LPPD	5 Dokumen											
14	% SKPD yang telah menyampaikan laporan SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

15	Nilai IKM	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
16	Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja	75%	75%	100%	62.96%	54.25%	75%	100%
17	Terklausanya koordinasi dan money penyeluruhn FASKIN	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan
18	Terklausanya kajian penusahaan daerah	2 kajian	-	1 Dokumen	2 kajian	-	1 Dokumen	1 Dokumen
19	Terklausanya koordinasi pengendalian inflasi daerah	2 rakor dan 1 sosialisasi	3 kali (20)	3 Money	2 rakor dan 1 sosialisasi	3 kali (20)	3 Money	3 moniev
20	Terklausanya evaluasi kegiatan pembangunan	11 bulan	11 bulan	12 kali rapat	12 kali rapat	11 bulan	12 kali rapat	12 kali rapat
21	Meningkatnya nilai rata-rata evaluasi fisik kegiatan	80%	86%	79.74%	100%	96.78	97.82 %	100%
22	Meningkatnya pengetahuan PA, KPA, panitia pejabat pengadaan serta PPK pengadaan barang dan jasa Pemerintah	90 orang	90 orang	96 orang	120 orang	90 orang	96 orang	120 orang
23	Meningkatnya persentase registrasi dan verifikasi proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah oleh LPSE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Meningkatnya persentase jumlah panitia pejabat pengadaan ,PPK dalam mengoperasionalkan LPSE	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Terklausanya pendidikan/ sosialisasi LPSE, SIRUP dan money online	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

26	Penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui Media Massa		- 35 Media cetak - 8 portal	35 Media Cetak 8 portal	-	- 57 Media cetak - 5 portal	49 Media Cetak 8 portal	-
		- 3 stasiun televisi	3 stasiun televisi	-	- 2 stasiun television	- 2 stasiun televisi	-	-
		- 2 radio	2 radio	-	- 2 radio	- 2 radio	-	-
		- 27 SKPD	27 SKPD	-	- 27 SKPD	27 SKPD	-	-
27	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID pembantu (%)	- 1 Sekretariat KPU 1 Sekretariat KPU	-	- 1 Sekretariat 1 Sekretariat KPU	-	-	-	-
		- 15 UPTD	15 UPTD	-	- 15 UPTD	15 UPTD	-	-
		- 10 informasi berkala	10 informasi berkala	-	- 10 informasi berkala	10 informasi berkala	-	-
		- 10 informasi setiap saat	10 informasi setiap saat	-	- 10 informasi setiap saat	10 informasi setiap saat	-	-
		- 2 informasi serta merta	2 informasi serta meria	-	- 2 informasi serta merta	2 informasi serta merta	-	-
28	Ditetapkannya Daftar Informasi Publik (%)		-	-	-	-	-	-
29	Jumlah kegiatan yang dihadiri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	120 Kegiatan	100 Kegiatan	-	- 411 Kegiatan	180 Kegiatan	-	-
30	Menghimpun dan Mendokumentasikan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Kerjasama Dengan Media Massa		-	35 Media Cetak Cetak	-	35 Media Cetak Cetak	35 Media Cetak Cetak	-
			-	- 6 Media Online	6 Media Online	-	- 6 Media Online	6 Media Online
			-	- 3 media elektronik	3 media elektronik	-	- 3 media elektronik	3 media elektronik
31	Tersusunnya Pidato kepala Daerah		-	- 24 Dokumen	24 Dokumen	-	- 24 Dokumen	24 Dokumen
32	Terlaksannya kegiatan Pemerintahan	-	- 12 kali	12 kali	-	- 12 kali	12 kali	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyeleenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat Daerah, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Kota Padang Panjang Perwako Nomor 29 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap Pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari : Sekretaris Daerah (eselon II A), 3 (tiga) staf ahli (eselon II B), 3 (tiga) Asisten (eselon II B), 9 (sembilan) Bagian (eselon III A) serta 25 Sub Bagian (eselon IV A).

1. Staf Ahli.**a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Pemerintahan, hukum dan politik baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan, memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, keuangan dan Pembangunan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Kemasyarakatan dan SDM, baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Asisten .

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Trantibum dan Linmas, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, perlindungan dan penegakan hak azasi manusia, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Pariwisata;
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
8. Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a.1 Bagian Pemerintahan ;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pemerintahan umum;
- 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan

3) Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.

a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat ;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;

a.3 Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang hukum dan HAM.

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
- 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM ; .

b. Asisten Perekonominan dan Pembangunan

Asisten Perekonominan dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian,

BUMD/Perbankan, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

1. Dinas Pangan dan Pertanian;
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas PU dan Penataan Ruang;
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
7. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

b.1 Bagian Perekonomian;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup, serta perbankan dan lembaga keuangan non bank.

Bagian Perekonomian terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- 2) Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

b.2 Bagian Pengendalian Pembangunan;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi,

Statistik dan Persandian.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Administasi Program;
- 2) Sub Bagian Pengendalian Kegiatan; dan
- 3) Sub Bagian Bina Infrastruktur.

b.3 Bagian Perencanaan dan Anggaran;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Keuangan.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interent, pelayanan barang dan jasa, serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

1. Sekretariat DPRD;
2. Inspektorat;
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

c.1 Bagian Organisasi

mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang organisasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
- 2) Sub Bagian Tata Lakasana;
- 3) Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.

c.2 Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang umum

Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan.

c.3 Bagian Protokoler dan Dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang Protokoler dan dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi terdiri diri

- 1) Sub Bagian Protokoler;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
- 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan.

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki peran sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan di Kota Padang Panjang sehingga kondisi tersebut dapat menjadikan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang maka bentuk tantangan pelayanan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tantangan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupaya mewujudkan Harmonisasi dan Sin kronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja kebijakan SDA/LH, meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan, mengembangkan ekonomi, membina BUMD serta mewujudkan kehidupan manusia yang Islami.

Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Stake Holder
3. Adanya peluang peningkatan kapasitas pegawai
4. Tersedianya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sebagai penyelenggara urusan wajib pemerintahan daerah bidang urusan OTODA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian diarahkan dalam rangka Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN, Menyusun dan menerapkan SPM, Membangun dan mengembangkan sistem dan manajemen pelayanan publik, Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan Pembinaan kesadaran hukum.

Selanjutnya Sekretariat Daerah Kota juga diarahkan dalam rangka Melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang optimal dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan serta meningkatkan akurasi data dalam setiap proses perencanaan pembangunan, Percepatan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat, Membangun dan mengeimbangkan pusat pertumbuhan ekonomi kota sesuai RTRW, serta Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu dijelaskan yang menjadi Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
7	8	9	10	11	12
Peningkatan Produktifitas Lokal	Pertumbuhan ekonomi	6,1%	Meningkatnya nilai pedagangan jasa dan pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran	4,9%
				Percentase KPRI yang sehat	70%
				Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,2%
				Capaian SPM Bidang perizinan	40 %
				Capaian SPM Bidang Ketenagakerjaan	40 %
Terwujudnya sekolah sehat	sekolah sehat		Meningkatnya UKS yang aktif	Percentase UKS yang aktif	72,45%
Penguatan kelembagaan keagamaan	Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga keagamaan		Meningkatnya pelaksanaan kegiatan keagamaan	Percentase jumlah mesjid dan mushalla yang aktif	50
				- Majelis taklim - FKL -DDS - Remaja Mesjid - TPQ/TPA - Wirid mingguan	
Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang	Indek kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Capaian SPM Bidang lingkungan hidup	80%

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
berkualitas dan berkelanjutan				
Meningkatkan tata pemerintahan yg baik dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	NILAI SAKIP	55
Meningkatkan pelayanan publik yg transparan	Nilai IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai rata2 IKM	60,00
	Sertifikasi ISO	Layak	Layak/tidak layak	Sertifikat ISO
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Kepala Daerah yang difasilitasi	Terfasilitasinya kegiatan kedinasan KDH /WKDH	Ya/Tidak	64 kegiatan 100%
Tertibnya admininstrasi dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan	Nilai realisasi fisik	Baik	Meningkatnya realisasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Rata-rata evaluasi fisik kegiatan 85 %

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan di atas maka dilaksanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2018 sesuai dengan tupoksi dari Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019

Pagu Anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
2 0 3	Urusan Wajib						
2 0 2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepengawainan dan Persandian						
2 4 0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase penemuan pelayaran administrasi perkantoran	90%	24,059,470,500	-	26,358,837,250
0 0 1	0 Penyediaan Jasa Surat 1 Menyurat	Jumlah pembelian materai, jumlah paket yang dikirim	1 tahun	7,228,616,000			5,847,191,000
0 2 2	0 Penyediaan Jasa 2 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, fax, air dan listrik kantor	Padang Panjang	27,000,000	APBD	Bag. Umum	35,041,000
0 3 3	0 Penyediaan Jasa 3 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Padang Panjang	324,000,000	APBD	Bag. Umum	300,000,000
0 6 6	0 Penyediaan Jasa 6 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara /dioperasionalkan	Padang Panjang	581,370,000	APBD	Bag. Umum	196,900,000
				1,347,587,000	APBD	Bag. Umum	1,752,050,000

0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan yang tersedia	Padang Panjang	1 tahun	408,675,000	APBD	Bag. Umum	100%	489,500,000		
0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jasa peralatan gedung kantor yang disediakan	Padang Panjang	1 tahun	50,020,000	APBD	Bag. Umum	100%	80,000,000		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Padang Panjang	1 tahun	50,060,000	APBD	Bag. Umum	100%	38,500,000		
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah fotocopi yang disediakan	Padang Panjang	1 tahun	120,000,000	APBD	Bag. Umum	100%	175,000,000		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Padang Panjang	1 tahun	50,000,000	APBD	Bag. Umum	100%	50,000,000		
1	Penyediaan Makarau dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	Padang Panjang	1 tahun	536,200,000	APBD	Bag. Umum	100%	849,110,000		
1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	Padang Panjang	1 tahun	3,500,000,000	APBD	Bag. Umum	100%	1,800,000,000		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	Padang Panjang	1 tahun	233,784,000	APBD	Bag. Umum	100%	81,000,000		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatru		90%	1,632,015,000				2,454,650,000		
2	Peneliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Padang Panjang	2 unit	1,150,015,000	APBD	Bag. Umum	1 tahun	2,000,000,000		
2	Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Padang Panjang	1 tahun	50,000,000	APBD	Bag. Umum	1 tahun	50,000,000		

	2	Pemeliharaan 2 Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Padang Panjang	1 unit	300,000,000	APBD	Bag. Umum	1 tahun	300,000,000	
	2	Pemeliharaan 7 Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dirasas	Padang Panjang	1 tahun	7,500,000	APBD	Bag. Umum	1 tahun	7,500,000	
	2	Pemeliharaan 8 Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peraiatan gedung kantor yang dipelihara	Padang Panjang	1 tahun	124,500,000	APBD	Bag. Umum	1 tahun	97,150,000	
2	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Padang Panjang	90%	231,750,000	APBD	Bag. Umum	1 tahun	500,000,000	
0	0	0 Pengadaan Pakaiian 2 Dinas Beserta Perlengkapannya	Terryujudnya disiplin aparatur dalam berpakaian waktu melaksanakan tugas	Padang Panjang	1 tahun	231,750,000	APBD	Bag. Umum	1 tahun	500,000,000	
2	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatut yang mengikuti bintek	Padang Panjang		260,000,000	APBD	Bag. Umum	1 tahun	400,000,000	
0	0	0 Bimtek Implementasi 1 Peraturan Perundang- undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek	Padang Panjang	43 orang	260,000,000	APBD	Bag. Umum	1 tahun	400,000,000	
2	4	Program Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				7,300,000				10,000,000	
0	0	0 Penilaian Kompetensi 1 Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah	Jumlah Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah yang dinilai kopetensinya	Padang Panjang	18 ASN	7,300,000	APBD	Bag. Pemerintahan	7 Pemera- ting	10,000,000	
2	4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			70,000,000	APBD	Bag. Umum		-	
0	1	0 Peningkatan Pelayanan 1 Berstandar ISO 9001	Jumlah Evaluasi ISO 9001 yang dilaksanakan	Padang Panjang	1 kali	70,000,000	APBD	Bag. Umum		-	

2	4	1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terfasiilitasinya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				3,481,732,000				3,575,142,000
0	6											
		0	Fasilitas Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah	Jumlah Kunjungan Tamu Daerah yang diaasilitasi	Padang Panjang	1 tahun		38,200,000	APBD	Bag. Protokoler	1 tahun	38,200,000
		2	Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Pidato yang disusun	Padang Panjang	84 dikumen		29,200,000	APBD	Bag. Protokoler	1 thn	39,200,000
		8		Jumlah Peringatan hari besar Nasional yang dilaksanakan	Padang Panjang	1 tahun		100,000,000	APBD	Bag. Umum	1 tahun	50,000,000
		0	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang panjang yang dilaksanakan	Padang Panjang	2 kegiatan		126,590,000	APBD	Bag. Pemerintahan	1 kali	160,000,000
		2	Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang	Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan.	Padang Panjang	1 thn		150,000,000	APBD	Bag. Protokoler	1 thn	150,000,000
		6	Pelaksanaan Kegiatan APEKSI Tahun 2018	Jumlah Munas APEKSI dan Muskod APEKSI	Padang Panjang	1 Tahun		100,000,000	APBD	Bag. Pemerintahan	1 Tahun	200,000,000
		7	Penunjang Operasional KDH/WKDH	Jumlah Pelayanan operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah	Padang Panjang	1 Tahun		2,635,930,000	APBD	Bag. Protokoler	1 Tahun	2,635,930,000
		8	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan	Padang Panjang	1 Tahun		301,812,000	APBD	Bag. Protokoler	1 Tahun	301,812,000
		2	Program Penataan Peraturan Perundangan	Pengharmonisasi, penyebarluasan produk hukum daerah dan penyelesaian								1,070,800,000

			masalah hukum daerah					
1	Pelepasan Masalah Hukum Pemda	Jumlah permasalahan hukum Pemerintahan Daerah dibidang perdata dan TUN yang disoleskan	Padang Panjang	1 laporan	APBD	Bag. Hukum dan HAM	1 laporan	578,000,000
2	Pengembangan dan Pemanfaatan Konsep Produk Hukum Daerah	Jumlah pembuatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dihasilkan	Padang Panjang	8 Perda dan 20 Perwako	APBD	Bag. Hukum dan HAM	8 Perda dan 20 Perwako	250,000,000
3	Pembuatan Berita Daerah dan Lembaran Daerah	Jumlah buku lembaran Daerah dan Web JDIH yang diterbitkan	Padang Panjang	450 buku lembaran Daerah, dan 450 buku berita daerah	APBD	Bag. Hukum dan HAM	450 buku lembara n Daerah, dan 450 buku berita daerah	130,000,000
4	Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat	Jumlah Masalah Hukum Masyarakat yang difasilitasi	Padang Panjang	1 laporan	APBD	Bag. Hukum dan HAM	1 laporan	20,800,000
5	Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat	Padang Panjang	200 orang	APBD	Bag. Hukum dan HAM	200 orang	80,000,000
6	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RANHAM	Jumlah laporan Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Padang Panjang yang disusun	Padang Panjang	1 laporan	APBD	Bag. Hukum dan HAM	1 laporan	12,000,000
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Penataan Batas Antar Wilayah	2 kecamatan	90,000,000				140,000,000

1	7	Penegasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang	jumlah Dokumen Koordinat titik Batas antar Wilayah yang disusun	Padang Panjang	1 dokumen	APBD	Bag. Pemerintahan	1 dokumen
8	8	Penamaan rupa bumi dan unsur alami		Padang Panjang	1 dokumen	30,000,000	Bag. Pemerintahan	30,000,000
9	9	Fasilitasi kerjasama dengan LKPP	Jumlah kerjasama dengan LPPP yang dihasilkan	Padang Panjang	1 dokumen	30,000,000	Bag. Umum	30,000,000
2	4	3	Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	24 OPD	154,605,000		148,065,500
0	1	0	Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah bidang Fasilitasi pencapaian SPM	6 bidang	29,905,000	APBD	Bag. Org 6 bidang
4	4	0	Monitoring dan Evaluasi Perwako kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dimonitoring dan Evaluasi Perwako kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah	24 OPD	29,005,000	APBD	Bag. Org 24 OPD
7	7	0	Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Padang Panjang	1 kali	58,000,000	APBD	Bag. Org 1 kali
9	9	1	Penerapan Kelas Jabatan Dalam Sistem Merit Manajemen ASN	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi perubahan paradigma manajemen ASN dalam menyikapi	60 orang	40,000,000	APBD	Bag. Org 45 buku

2	4	0	Pembinaan SOP	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan SOP	Padang Panjang	24 OPD	26,700,000	APBD
0	8	1						Bag. Org
2	4	0	Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terkelaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				24 OPD
0	8	2	0 Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan Baku Muiu Felayanan Publik di Kota Padang Panjang	Padang Panjang	24 OPD	50,000,000	APBD
2	4	3	Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat	Padang Panjang	24 OPD	18,935,000	APBD
0	9	1						Bag. Org
2	4	3	Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah	Percentase Peningkatan Kordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah		100%	195,000,000	
0	9	1	0 Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian laju Inflasi di Kota Padang panjang yang disusun	Padang Panjang	1 Laporan	50,000,000	APBD
2	4	3	1 Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Jumlah Koordinasi Penyelegaraan Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Padang Panjang	1 Laporan	55,000,000	APBD
0	9	4	1 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang	Jumlah KPRI yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi Perkembangannya	Padang Panjang	26 KPRI	35,000,000	Bag. Perek
2	4	0						26 KPRI
0	8	1						60,000,000

1	5	Fasilitasi dan Penobiamaan BUMD	Jumlah BUMD yang difasilitasi dan dibina	Padang Panjang	2 BUMD	—	APBD	Beg. Perek
1	7	Koordinasi Kebijakan Bidang Sarana dan kelembagaan ekonomi daerah	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan Bidang Sarana dan kelembagaan ekonomi daerah yang dilaksanakan	Padang Panjang	1 kegiatan	—	APBD	Beg. Perek
2	0	3	Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	—	253,375,000	—	2 BUMD
0	3	6	Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan dan Sosialisasi Aplikasi Simbangda yang dilaksanakan	Padang Panjang	1 th, 12 buah laporan, 24 OPD	APBD	Beg. P.Pembangunan
0	0	1	Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan pengadaan secara elektronik (SPSE dan aplikasi pendukungnya)	Padang Panjang	110 orang (PPK, Pejabat Pengadaan, Admin RUP, Pokja ULP, Tim LPSE, Penyedia B/J)	APBD	Bag. P.Pembangunan
						33,475,000	—	50,000,000
						—	110 orang (PPK, Pejabat Pengadaan, Admin RUP, Pokja ULP, Tim LPSE, Penyedia B/J)	1 kegiatan
						—	—	60,000,000
						—	—	120,000,000

0	Operasional							
3	Maintenance LPSE							
		Jumlah Infrastruktur dan maintenance LPSE yang dikelola						
			Padang Panjang	Operasional LPSE, pengadaan peralatan/Pengembangan Aplikasi		Bag. P.Pembangunan	Operasi onal LPSE, pengadaan peralatan/Pengembangan	93,500,000
1	Bimbingan Teknis	Jumlah Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pokja ULP dan PPK	Padang Panjang	80 orang, 24 OPD	APBD	Bag. P.Pembangunan	Applikasi	
3	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			40,000,000				85,000,000
1	Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pembekalan Petugas Teknis Lapangan		80 orang	APBD	Bag. P.Pembangunan	60 orang, 2 angkatan (6 hari), 27 SKPD	
4				40,000,000				67,225,000
1	Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur	Jumlah peserta Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur		80 orang	APBD	Bag. P.Pembangunan	80 orang	
5				25,000,000				49,150,000
2	4	3	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Baik	221,838,000		372,392,500
0								
0	Penyusunan LAKJIP	Tersusunnya Buku laporan kinerja pemerintah Kota Padang Panjang	Padang Panjang	1 Dokumen	APBD	Bag. Org	1 Dokumen	57,000,000
1	Kota Padang Panjang			52,088,000				
0	Evaluasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen laporan evaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	Padang Panjang	1 Dokumen	APBD	Bag. Org	1 Dokumen	120,000,000
2	Kota Padang Panjang							
1	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang	Jumlah Buku Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang	Padang Panjang	90 buku	APBD	Bag. Org	45 buku	10,725,000
4				9750,000				

2	4	2	1	Penyusunan Buku LKPJ	Tersusunnya buku LKPJ Wako	Padang Panjang	1 Dokumen	APBD	Bag. Pemerintahan	1	Dokumen	40,000,000
0		3	3	Penyusunan Laporan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Padang Panjang	1 Dokumen	APBD	Bag. Pemerintahan	1	Dokumen	75,000,000
		4	4	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	Padang Panjang	12 bulan	APBD	Bag. F.Pembangunan	12	bulan	69,667,500
2	4	1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan koordinasi dibidang sosial, kesehatan, pendidikan dan pelayanan keagamaan		80%	8,966,154,500					10,676,243,750
0	0	6	6	1 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 6 Pelaksanaan Pesantren Ramadhan	Jumlah UKS se Kota Padang Panjang yang dibina Terlaksananya pesantren Ramadhan	Padang Panjang	4 sekolah	APBD	Bag. Kesra	4	sekolah	170,000,000
		1	1	Muzakarah Ujama Kota	Jumlah materi yang dihasilkan pada Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang	Padang Panjang	45 sekolah	APBD	Bag. Kesra	45	sekolah	426,056,250
		4	4	2 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah peringatan Hari-hari Besar Islam yang dielenggarakan	Padang Panjang	4 materi	APBD	Bag. Kesra	4 materi		113,875,000
		5	5	0 Akreditasi, Pelatihan dan Sertifikasi Guru TPQ/TPSQ	Jumlah Guru TPQ/TPSQ yang terakreditasi/ sertifikasi	Padang Panjang	230 orang	APBD	Bag. Kesra	5 kali		202,125,000
		8	8	0 Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan	Jumlah kegiatan Tim Ramadhan	Padang Panjang	1 kali	APBD	Bag. Kesra	1 kali		128,750,000

0	9	Peningkatan Kesejahteraan Guru TPQ/TPSQ, Imam Mesjid dan Gharin/Petugas Kebersihan, Mesjid/Mushalla, dan Pengurus Baznas Kota Padang Panjang	Jumlah Guru TPQ/TPSQ, Imam Mesjid, Gharin/Petugas Kebersihan, Mesjid/Mushalla dan Pengurus Baznas Kota padang Panjang yang disediakan	Padang Panjang	230 TPQ, 38 Imam Mesjid, 38 Garin Mesjid, 65 Garin Mushala, 38 Khatih Cadangan dan 5 orang pengurus Baznas	APBD	Bag. Kesra	230 TPQ, 38 Imam Mesjid, 38 Garin Mesjid, 65 Garin Mushala ,38 Khatib Cadangan dan 5 orang pengurus Baznas
1	0	1 Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah jemah haji yang difasilitasi keberangkatan dan penjemputannya	Padang Panjang	200 orang	200.000.000	APBD	Bag. Kesra
1	1	1 Bimbingan dan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Jumlah peserta Pelatihan dan lomba penyelenggaraan jenazah	Padang Panjang	35 orang	25.650.000	APBD	Bag. Kesra
2	2	2 Pembinaan Tarifiz Qur'an	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Tahfiz Qur'an	Padang Panjang	2 kelurahan	14.650.000	APBD	Bag. Kesra
2	3	2 Mengikuti MTQ Tingkat Propinsi	Jumlah kafilah yang Mengikuti MTQ Tingkat Propinsi	Padang Panjang	60 orang	60.000.000	APBD	Bag. Kesra
2	4	2 Persiapan Mengikuti MTQ Propinsi Sumatera Barat	Jumlah kafilah yang mengikuti TC MTQ Propinsi Sumbar	Padang Panjang	60 orang	31.000.000	APBD	Bag. Kesra
3	3	3 Pembinaan Remaja Mesjid Kota Padang Panjang	Jumlah Mesjid yang menyelenggarakan kegiatan remaja mesjid	Padang Panjang	38 mesjid	425.650.000	APBD	Bag. Kesra
3	3	3 Money Efektifitas Bantuan Hibah	Jumlah Money, verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah yang	Padang Panjang	10 kali	15.000.000	APBD	Bag. Kesra

itas 2

2	0	4	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penetapan sarana dan prasarana aparatuer	90%	1,113,500,000				600,000,000	
				0	Pengadaan 7 perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Padang Panjang	1 tahun	1,113,500,000	APBD	Bag. Umum	1 tahun	600,000,000
2	0	4	1	7	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			32,125,000	APBD			50,000,000
					Pelatihan SDM dalam didang protokoler dan MC	Jumlah yang mengikuti Pelatihan SDM dalam bidang protokoler dan MC	Padang Panjang	50 orang	32,125,000	APBD			50,000,000
2	0	4	1	8	Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Perekonominian Daerah	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran			80,000,000				95,000,000
				0	Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan	Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup	Padang Panjang	1 Laporan	40,000,000	APBD	Bag. Perek	1 laporan	50,000,000
				0	Koordinasi Kebijakan Umum Perizinan Usaha	Jumlah laporan Koordinasi Kebijakan Umum Perizinan Usaha	Padang Panjang	1 Laporan	40,000,000	APBD	Bag. Perek	1 laporan	45,000,000
2	0	3	6	3	Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan			50,000,000				60,000,000
					Pelatihan Internal ULP	Jumlah peserta pelatihan Internal ULP	Padang Panjang	12 orang	50,000,000	APBD	Bag. Umum	12 orang	60,000,000
2	0	4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan struktural			80,000,000				120,000,000

			Tersedianya Standar koperensi jabatan struktural	Padang Panjang	45 buku	40,000,000	APBD	Bag. Organisasi	45 buku	60,000,000
			Terlaksanaan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR kepada pejabat penghubung	Padang Panjang	45 buku	40,000,000	APBD	Bag. Organisasi	45 buku	60,000,000
2	4	4	Program Peningkatan koordinasi kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya pembinaan dan kualitas Pelayanan Publik	24 OPD	60,000,000				60,000,000
0	8		Sosialisasi SP4N-LAPOR ! Kepada Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi SP4N-LAPOR ! Kepada Masyarakat	80 orang	60,000,000	APBD	Bag. Organisasi	80 orang	60,000,000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018–2023, dengan memperhatikan percepatan pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

Untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang yang juga merupakan acuan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Semua masukan dan pemecahan masalah diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dan kekurangan yang ada sekarang serta perencanaan yang akan datang. Dengan demikian diharapkan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019, merupakan kebutuhan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diwujudkan.

Padang Panjang, September 2018

*PLT. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG*

*INDRA GUSNADY, SE, M.Si
NIP. 19700804 199803 1 006*